



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9
TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN
PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA KOTO
PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

LILIS RAHMAWATI

NIM : 11627204087

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/ 2020 M

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandta No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA
KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA

: LILIS RAHMAWATI
: 11627204087
: ILMU HUKUM

Disahkan dan dimunaqasyahkan pada :

: Senin / 27 April 2020
: 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,

2020

Tim Penguji



Dr. H. Alaghfirah, MA
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

2. Musrifah, SH., MH.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Firdaus, SH., MH.
(Anggota Penguji)

4. Muslimah, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

LILIS RAHMAWATI: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA

Penelitian ini dilatar belakangi oleh implementasi kebijakan yang belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan segala syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan publik. Penyebab tidak maksimalnya implementasi suatu kebijakan adalah penafsiran tentang tujuan suatu kebijakan, sumber daya, konsistensi dan profesionalisme implementor. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi dan mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi pada peraturan daerah kabupaten kampar no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan, salah satunya pasal 64 ayat (b) yang memberikan pengaturan dilarangnya melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang menimbulkan kerusakan. Namun dibentuknya perda tersebut ternyata tidak mampu merubah kebiasaan sebagian peternak di Kabupaten Kampar terkhusus Desa Koto Perambahan, karena masih banyak hewan ternak yang bekeliaran di perkarangan rumah hingga lapangan olahraga yang menimbulkan kerusakan bahkan kerugian.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis dan menggunakan sumber data primer dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket.

Hasil penelitian ini menunjukkan peraturan daerah kabupaten no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di desa koto perambahan terkhusus pasal 64 ayat (b) belum berjalan secara fektif dan belum terlaksana dengan optimal, hal ini dipicu oleh sanksi tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya pemberian sanksi yang tertera dalam perda. Selanjutnya faktor penghambat implementasi perda tersebut yaitu komunikasi yang tidak maksimal dalam penyampaian kebijakan, kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, disposisi sikap yang diberikan implementator terhadap pelanggar tidak tegas, sumberdaya manusia/personil yang dimiliki masih kurang, dan tidak tersedianya sarana dan prasaranan yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Marhaban dan Ibunda Nurjasni yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa , restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yag telah banyak membantu dalam peyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar, SH. MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak syafrinaldi, SH, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Kepada abang kandung Apri Pratama, Fathoni, S.Ikom dan adik kandung Fahma Reza, yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Popy Pirmadari, Afifah Zikriyah, Erwinsyah yang selalu memotivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini.
10. Kepada Muhammad Zaky, SH, Amaliah Husnul, SH, Fitri Ayu Lestari, Aulia Hizbullah, Muhammad Fadlan Al khair, Ahmad Afrizal dan Aswarudian telah menemani selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Adepri Maulana, Muhammad Qodri, Azmi Alfarozi, terimakasih telah menemani selama proses perkuliahan ini.
12. Kepada Abang Trivivonda, Sp terimakasih telah memberikan semangat yang luar biasa, sehingga skripsi ini siap pada waktu yang tepat.
13. Kepada rekan-rekan KKN Uin Suska Riau 2019 Desa Koto Cerenti, terkhusus kepada Mitha Mandasari, Faisal dan Muhammad Alan Subati.
14. Kepada Ilmu Hukum A dan kelas D Konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, amin.

Pekanbaru, 28 Februari 2020

Lilis Rahmawati

NIM.11627204087

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftarisi.....	iv
DaftarTabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Kampar	14
B. Profil Desa Koto Perambahan	18
C. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Perambahan.....	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	30
B. Pengertian Implementasi.....	33
C. Implementasi Kebijakan	35
D. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	37
E. Faktor Penghambat Implementasi	39
F. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi	41
G. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)	42
H. Pengertian Hewan Ternak.....	44
I. Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016.....	48



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Pasal 46 ayat (b) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.. 53
- B. Faktor Penghambat Implementasi Pasal 46 ayat (b) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa... 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran 73

Daftar Pustaka

Lampiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 POPULASI DAN SAMPEL.....	9
TABEL I JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELAMIN DI DESA KOTO PERAMBAHAN.....	21
TABEL II JUMLAH KK DI DESA KOTO PERAMBAHAN	22
TABEL III PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN.....	22
TABEL IV SARANA PENDIDIKAN YANG ADA DI DESA KOTO PERAMBAHAN	23
TABEL V JUMLAH FASILITAS RUMAH IBADAH DESA KOTO PERAMBAHAN	24
TABEL VI PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN MENURUTMATA PENCAHARIAN	28
TABEL VII. 1 TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016.....	56
TABEL VII. 2 TANGGAPAN PETERNAK TENTANG PERATURAN DAERAH NOMOR 9 Tahun 2016.....	57
TABEL VII. 3 TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG ADANYASOSIALISASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016.....	59
TABEL VII. 4 TANGGAPAN PETERNAK TENTANG ADANYA SOSIALISASI PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016.....	59
TABEL VII. 5 TANGGAPAN MASYARAKAT APAKAH MERASA TERGANGGU ATAU TIDAK DENGAN HEWAN YANG BERKELIARAN DIPERKARANGAN RUMAH	65



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL VII. 6 TANGGAPAN PETERNAK APAKAH PERNAH MENDAPAT SANKSI DARI PEMERINTAH JIKA KEDAPATAN TERNAKNYA BERKELIARAN...	69
--	-----------

TABEL VII. 7 TANGGAPAN MASYARAKAT BAHWAKETIDAKTEGASAN PEMERINTAH MENJADI FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016.....	70
---	-----------

TABEL VII. 8 TANGGAPAN PETERNAK TERHADAP SARANA DAN PRASARANA YANG MENJADI PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016.....	71
--	-----------

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang memiliki usaha peternakan yang ada di provinsi Riau. Baik dalam bentuk skala kecil hingga menengah. Beternak ialah usaha manusia untuk mengembangbiakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.¹ Seperti halnya kabupaten lain yang sedang berkembang, kabupaten Kampar juga merasakan fenomena yang serupa yang pada umumnya masyarakat kabupaten Kampar ada yang memiliki usaha peternakan. Perkembangan usaha tersebut sangat pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, pabrik-pabrik, sarana hiburan dan sebagainya. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu dan pengetahuan yang cukup bisa jadi penyambung hidupnya, sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung maka ada yang memilih mencari uang dengan cara bertani, nelayan dan membuka usaha peternakan. Sebagian besar masyarakat kabupaten Kampar memang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak untuk bertahan hidup di kota Serambi Mekah ini.

Biasanya ternak yang paling mendominasi di daerah ini adalah kambing, terutama di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya,

¹ M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanannya dan berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.²

Dalam mendirikan usaha peternakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya ialah kandang atau lahan khusus untuk tempat ternak agar ternak tidak berkeliaran dan mengganggu masyarakat serta merusak fasilitas umum. Seiring berkembangnya kambing ternak yang dipelihara oleh masyarakat, maka ada diantara ternak tersebut yang berkeliaran pada perkarangan rumah dan pertamanan orang di berbagai tempat. Oleh karena hal itu, membuat masyarakat sekitar terganggu dan dirugikan dengan adanya hal tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan. Khususnya pasal 46 ayat (b) yang berbunyi “Melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada perkarangan rumah , pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan”³. Sejauh ini Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa khususnya, sebagaimana pengamatan awal yang penulis lakukan belum ditindak tegas terhadap pelaksanaan ini oleh pemerintah kabupaten

² Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak

³ Perda No.9 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar, padahal peraturan ini sudah berlaku selama 3 tahun, serta peraturan ini tidak membuat efek jera terhadap peternak yang melalaikan kewajibannya terhadap ternak, masih saja banyak hewan ternak yang sampai ke perkarangan rumah warga dan pertamanan maupun lapangan bola.

Wujud suatu kabupaten yang kondusif, tentram, bersih, tertib dan aman harus dilakukan oleh pemerintah adalah terutama dengan mengatasi masalah ternak yang merusak pekarangan rumah dan fasilitas lain khususnya di Desa Koto Perambahan kecamatan Kampa. Kebijakan publik diatas merupakan kebijakan yang tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan kemudian tanpa ada realisasi dari pelaksanaannya atau implementasi dari terbentuknya peraturan tersebut, tetapi sebuah kebijakan publik yang harus dilaksanakan dan di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA”**

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Pembahasan dalam karya ilmiah ini difokuskan kepada implementasi dan hambatan terhadap implementasi pasal 46 ayat (b) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan kecamatan Kampa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi pasal 46 ayat (b) pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa ?
- b. Apa hambatan terhadap implementasi pasal 46 ayat (b) pada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa ?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- b. Mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan penertiban serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.
- c. Mengetahui apa saja hambatan terhadap implementasi pasal 46 ayat (b) pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan dan penertiban serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bermanfaat sebagai :

- a. Kegunaan teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah , minimal memperkaya dan menambah hasil-hasil penelitian dibidang hukum tata negara.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah kabupaten Kampar terkait penyelenggaraan dan penertiban serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.
- c. Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti, serta penelitian ini dapat menambah referensi diperpustakaan guna untuk menjadi literatur kegiatan belajar di UIN suska. Disamping itu karya ilmiah ini adalah syarat dari penyelesaian pendidikan strata satu (SI) pada fakultas syariah dan hukum UIN suska.

5. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.⁴

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penggolongan penelitian hukum sosiologis. Dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

Jadi, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menganalisa masalah penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2016 khususnya pasal 46 ayat (b) tentang larangan bagi pemilik hewan ternak berdasarkan uraian-uraian yang di analisis dalam bab pembahasan.

⁴ Jonaedi Efendi dkk, *Metode peneitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2018) cetakan 2, h. 2.

⁵ *Ibid*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016, khususnya pasal 46 ayat (b) di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.

c. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian⁶. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peternak kambing yang ada di Desa Koto Perambahan kecamatan Kampa, masyarakat yang terkena dampak dari kambing ternak yang berkeliaran, dinas peternakan Kabupaten Kampar serta kasi trantib Satpol PP kabupaten Kampar.

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian.⁷ Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam

⁶https://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 24 oktober 2019, pukul 19.00 WIB

⁷*Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan ini ialah implementasi dari pasal 46 ayat (b) dan hambatan pada pasal 46 ayat (b) pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁸ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah peternak yang ada di Desa Koto Perambahan sebanyak 30 orang, masyarakat yang terkena dampak hewan ternak yang berkeliaran sebanyak 1.150 KK, kepala dinas peternakan Kabupaten Kampar sebanyak satu orang serta kasi trantib Satpol PP Kabupaten Kampar sebanyak satu orang, karena populasi banyak, maka peneliti hanya mengambil setengah dari populasi untuk dijadikan sampel yaitu 15 orang peternak, untuk warga peneliti hanya mengambil 10% yaitu 115 KK, sedangkan untuk kepala dinas peternakan Kabupaten

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 118.

⁹*Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kampar dan Kasi Trantib Satpol PP Kabupaten Kampar, peneliti mengambil sampel 100%.

TABEL 1.1

POPULASI DAN SAMPEL

NO	RESPON- DEN	JUMLAH POPULA SI	JUMLAH SAMPEL	PERSEN TASE	KET
1.	Kepala Bagian Pernakan Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100%	Wawa- ncara
2.	Kasi trantib Satpol PP Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100%	Wawa- ncara
3.	Peternak	30 Orang	15 Orang	50%	Angket
4.	Masyarakat yang terkena dampak hewan ternak berkelian	1.150 KK	115 KK	10%	Angket

Sumber : *Data Lapangan*, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, angket dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan yang sudah diolah berdasarkan kebutuhan dari penelitian ini.
3. Data Tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah buku-buku bacaan.

f. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap binatang ternak di lokasi Desa Koto Perambahan kecamatan Kampa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala dinas kabupaten Kampar dan kasi trantib satpol pp kabupaten Kampar.
3. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam hal ini peneliti membagikan angket kepada peternak kambing dan masyarakat yang terkena dampak dari ternak kambing yang berkeliaran.
4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

g. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan :

latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II

Gambaran Umum Lokasi penelitian

Bab ini membahas tentang profil Kabupaten Kampar, letak geografis Desa Koto Perambahan dan mata pencaharian masyarakatnya.

BAB III

Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan tentang konsep-konsep yang berkenaan dengan implementasi dari pasal 46 ayat (b) peraturan daerah kabupaten kampar nomor 9 tahun 2016.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian pasal 46 ayat (b) dan apa saja hambatan implementasi

pada pasal 46 ayat (b) peraturan daerah kabupaten kampar Nomor 9 Tahun 2016 di desa kotoperambahankecamatanKampa.

BAB V

Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping dijuluki Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

1. Sejarah

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti kedudukan bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan sungai Kampar Kanan dengan sungai Kampar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.¹¹

Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sulatan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugal,¹² melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya

¹¹R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, (Yogyakarta : Kenisius), h.

¹²R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3*, (Yogyakarta : Kenisius), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa diKampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

2. Geografi

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapasungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +_413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).¹³

3. Pemerintahan

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TingkatRiau Nomor : KPTS.318VII1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan

¹³<https://www.riamagz.com/2018/07/profil-kabupaten-kampar-riau.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 februari 2020, pukul 22.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawahkoordinator Kabupaten. Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh Catur Sugeng Susanto,SH yang menggantikan Alm H. Aziz Zainal, SH.MM, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk jabatan 2017-2022.¹⁴ Adapun Kecamatan yang terapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
2. Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
3. Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
4. Gunung Sahilan (ibu kota Kebun Durian)
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris)
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)
9. Kampa (ibu kota: Kampar)
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
13. Salo (ibu kota: Salo)

¹⁴ www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/03/16/aziz-zainal-catur-sugeng-bupati-dan-wakil-bupati-kampar-2017-2022, diakses pada 04 februari 2020, pukul 22.08 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)
15. Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
16. Tapung (ibu kota: Petapahan)
17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
19. XIII Koto Kampar (ibu koto: Batu Besurat)
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
21. Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada sensus penduduk tahun 2010 tercatat 688.204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa.¹⁵ Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Melayu, piliang/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau.¹⁶

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa. Penduduk di Kecamatan Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama

¹⁵ www.bps.go.id, Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar. Diakses pada 4 februari 2020. Pukul 22.10 WIB

¹⁶ Sumarsono dkk, *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Riau*, (Jakarta : Cv. Putra Sejati Raya), h.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampir 90% dari total seluruh pemilik agama yang ada di Kabupaten Kampar.

5. Perekonomian

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama dibidang pertanian, perikanan dan peternakan. Sebagian besar penduduk (67.22%) bekerja disektor pertanian, perkebunan, kehutanan serta peternakan. Hanya sebagian kecil (0,22%) yang bekerja di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, disamping pemerintahan. Sebagai salah satu daerah terluas di Propinsi Riau, Kabupaten Kampar secara berkelanjutan melakukan peningkatan fasilitas dan instruktur seperti jaringan jalan raya , jaringan listrik dengan 5 unit pembangkit tenaga diesel Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) DI Koto Panjang yang memproduksi energi dengan kapasitas tersambung sebesar 114,240 KWH. Fasilitas lain yang juga telah tersedia antar lain layanan telekomunikasi dan jaringan air bersih dengan kapasitas produksi sebesar 1,532,284 m³.

B. Profil Desa Koto Perambahan

1. Sejarah Perkembangan Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Menurut beberapa tokoh masyarakat, Desa Koto Perambahan dikenal karna dahulu keberadaannya adalah sebuah wilayah Kerajaan dengan Raja yang bernama Sultan Mahmud Adhli Syah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau yang lebih dikenali oleh Raja Koto, satu-satunya kerajaan yang ada di Kabupaten Kampar.¹⁷

Dengan bukti peninggalan yang sampai saat sekarang masih ada seperti: stempel kerajaan, keris, baju kerajaan dan peninggalan lainnya. Memang sebelumnya nama Desa ini adalah Desa Kampung Panjang Kampar, tapi pada masa pemerintahan Desa bapak Soedirman bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat mengganti nama Desa dengan nama Desa Koto Perambahan.¹⁸

Desa Koto Perambahan diambil dari nama perkampungan yang pertama ada di Desa ini yang dikenali dengan nama Pomban atau Perambahan, maka digantilah nama Desa Kampung Panjang menjadi Desa Koto Perambahan pada tahun 2001. Alasan kedua mengapa nama Desa Kampung Panjang diganti menjadi Desa Koto Perambahan, karena nama Desa Kampung Panjang sama dengan nama Desa yang berada di Air Tiris yaitu Desa Kampung Panjang Air Tiris.¹⁹

Desa Koto Perambahan mulai terbentuk pada tahun 1978 melalui pemekaran Desa Kampar dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala Desa yang pertama pada tahun 1978 dan dipimpin oleh kepala desa terpilih yaitu Nahar.

2. Kondisi Geografi Desa Koto Perambahan

Desa Koto Perambahan terletak di dalam wilayah Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

¹⁷ Profil Desa Koto Perambahan, Tahun 2018, h. 1

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuapan Kecamatan Tambang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Bungo dan Desa Kampar Kec. Kampa
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Palung Raya, Desa Kemang Indah Kec. Tambang Kabupaten Kampar

Luas wilayah Desa Koto Perambahan adalah 11 KM. Dimana 75% berupa daratan yang berpotogarafi berbukit-bukit, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan. Iklim desa, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa.²⁰

Lalu lintas perhubungan di wilayah Desa Koto Perambahan ini adalah melalui jalur darat dengan sebagian besar jalan aspal dan semenisasi dan sebagian kecil jalan tanah. Jalan ini menghubungkan ke beberapa tempat di desa-desa lain Kec. Kampar bahkan yang menghubungkan antara Pekanbaru dengan Sumatera Barat. Karena jalan raya Pekanbaru – Bangkinang melintasi wilayah Desa Koto Perambahan. Kantor kepala desa (Balai Desa) Koto Perambahan selaku pusat administrasi desa terletak

²⁰Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih kurang 15 KM dari Kantor Camat Kampar, 26 KM dari Ibu Kota Kab. Kampar dan 36 KM dari Ibu Kota Propinsi Riau.

3. Kondisi Demografi Desa Koto Perambahan

Dalam hal kependudukan, penduduk yang mendiami Desa KotoPerambahan adalah bersifat homogen dari berbagai aspek. Homogen dalam bahasa, homogen dalam adat-istiadat, homogen dalam beragama, dan lain-lain, secara umum dari penduduk yang mendiami Desa Koto Perambahan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari data statistik kependudukan tahun 2018 terhitung 5.044 jiwa dengan perincian 2.379 jiwa laki-laki dan 2.655 jiwa perempuan yang terhimpun dalam 1.150 kepala keluarga. Terbagi dalam 6 (enam) wilayah Dusun.²¹

Tabel dibawah menunjukkan keadaan penduduk Desa KotoPerambahan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018

TABEL I

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	LAKI-LAKI	2.379	47,16%
2.	PEREMPUAN	2.655	52.84%
3.	JUMLAH	5.044	100%

Sumber :Kantor Desa Koto Perambahan, 2019.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Koto Perambahan berdasarkan jenis kelamin perempuan terlihat lebih besar dari

²¹Ibid, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki. Ditabel 1. diatas terlihat bahwa jenis kelamin perempuan berjumlah 2.655 jiwa dengan persentase 52,84% (persen), dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.379 jiwa dengan persentase 47.16% (persen).

TABEL II
JUMLAH KK DI DESA KOTO PERAMBAHAN

NO	JUMLAH KK	PERSENTASE
1.	1.150	100%
JUMLAH		100%

Sumber :Kantor Desa Koto Perambahan, 2019.

Penduduk Desa Koto Perambahan juga dilatarbelakangi dengan tingkatpendidikan yang beragam. Dalam tabel berikut dapat dilihat jumlah pendudukDesa Koto Perambahan dalam tingkat pendidikan.

TABEL III
PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	SD (tidak sampai tamat)	65	1.28%
2.	SD/MI	1.532	30.37%
3.	SLTP/MTS	712	14.11%
4.	SLTA/MA	1087	21.55%
5.	SI/Diploma	762	15.10%
6.	Putus Sekolah	324	6.42%
7.	Belum sekolah	562	11.14%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	JUMLAH	5.044	100%
--	--------	-------	------

Sumber : Kantor Desa Koto Perambahan, 2019.

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Koto Perambahan menamatkan pendidikan mereka hingga tingkat SD. Hal ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang digeluti oleh mayoritas mereka yaitu tani. Sebab itu yang tidak mengharuskan mereka untuk menamatkan jenjang pendidikan tersebut.

Tingkat pendidikan mereka juga dipengaruhi faktor fasilitas dan sarana prasarana pendidikan yang ada. Selain menamatkan pendidikan yang ada di Kec. Kampa dan Pekanbaru, bahkan ada beberapa orang yang menempuh pendidikan di luar Riau seperti Padang dan Medan. Wilayah Desa Koto Perambahan juga terdapat beberapa sarana pendidikan sebagai berikut :

TABEL IV
SARANA PENDIDIKAN YANG ADA
DI DESA KOTO PERAMBAHAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK/PAUD	6
2.	SD dan PDTA	6
3.	SLTP/MTs	1
4.	SLTA/MA	1
5.	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Kantor Desa Koto Perambahan, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Desa Koto Perambahan merupakan penduduk yang homogen dalam hal keagamaan. Mereka termasuk penganut agama yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Koto Perambahan mempunyai beberapa mesjid dan mushalla yang dijadikan sebagai tempat ibadah, belajar mengaji dan upacara-upacara keagamaan lainnya, termasuk pula pertemuan dan musyawarah dalam membicarakan perbaikan kampung. Jumlah mesjid dan mushalla di Desa Koto Perambahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL V
JUMLAH FASILITAS RUMAH IBADAH
DESA KOTO PERAMBAHAN

NO	NAMA RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	9
2.	Mushallah	10

Sumber : Kantor Desa Koto Perambahan, 2019.

Tabel diatas menggambarkan bahwa agama mengambil peranan penting ditengah masyarakat Desa Koto Perambahan. Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintah seperti Departemen Agama dan Pemerintah Daerah TK II.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adat istiadat Desa Koto Perambahan

Masyarakat Desa Koto Perambahan adalah masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Terdapatnya persamaan kekerabatan antara daerah ini dengan Minangkabau, tidak terlepas dari kuatnya pengaruh Kerajaan Pagaruyung pada masa lampau, dimana daerah ini termasuk bagian dari daerah Pagaruyung. Dari sinilah asal mula berkembang terus hingga berdirinya propinsi Riau.

Pada masyarakat Limo Koto yang mana Desa Koto Perambahan termasuk dalam wilayah adat Limo Koto di bawah wilayah Kenegerian Kampar masuk ke dalam propinsi Riau, sementara ia memiliki budaya Minangkabau yang matrilinial, sedangkan budaya melayu patrilineal. Kesulitan yang timbul adalah penyebutan nama bagi komunitas tersebut. Apakah disebut melayu atau minang.²²

Tidak dapat disebut orang Melayu secara keseluruhan adalah karena secara adat lebih dekat dengan sistem budaya Minangkabau, tetapi juga tidak dapat disebut sebagai orang Minangkabau, karena mereka merupakan bagian dari masyarakat Riau.

Menurut adat, Koto Perambahan sebagai wilayah adat Limo Koto yang bentuk kekerabatannya bercorak Minangkabau, perkawinan yang

²² *Ibid*, h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan sistem itu ialah dengan cara mendatangkan laki-laki dari luar lingkungan kekerabatannya untuk maksud menghasilkan keturunan yang memperkembang anggota dari kelompok itu. Perkawinan semacam itu disebut kawin *samondo*, suami yang didatangkan *uang samondo*, sementara suami tetap berada pada jalur kekerabatannya pada kelompok ibunya sendiri.

Namun demikian, adat dan tradisi yang berlaku di daerah ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, terutama nilai-nilai keislaman dan secara berangsur-angsur nilai-nilai yang tidak sesuai dengan tata nilai Islam dibuang. Di sinilah letaknya makna ungkapan: *adat bersendisyara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengatakan dan adat memakai*. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, tradisi dipraktekkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga, orang harus mengikuti aturan agama dan juga aturan adat, yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Dari sisi prinsip-prinsip *immaterial*, peranan Islam sangat dominan, karena hampir semua sisi-sisi pandangan serta sikap hidup diwarnai dengan nilai keislaman, baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maupun dalam sosial ekonomi.²³

Sebagai sebuah daerah yang tidak terlalu jauh dari perkotaan, Desa Koto Perambahan perkembangannya termasuk sedang, tidak terlalu modern dan tidak pula tradisional. Tradisi dan kebiasaan yang berkembang

²³ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masyarakat telah menunjukkan kemajuan, hingga tidak lagi ditemukan upacara-upacara yang tidak produktif. Dewasa ini, terutama di era kemajuan sains dan teknologi, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi dan transportasi, membawa perubahan pula kepada pandangan hidup sebagian masyarakat di daerah ini. Dapat disaksikan pola hidup konsumtif telah mulai menggejala di dalam kehidupan masyarakat daerah ini. Sebagai sebuah komunitas yang memegang adat istiadat, masyarakat Desa Koto Perambahan masih memegang pola gotong royong dan musyawarah. Orang yang meninggalkan musyawarah akan ditinggalkan adat, dan akan dianggap tidak beradat sebuah sebutan yang merendahkan dan sekaligus memalukan.

Pengalaman adat tetap dipegang oleh masyarakat Desa Koto Perambahan, tetapi adat-istiadat telah agak longgar sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam (syara') sebagai sendi adat. Peraturan-peraturan adat yang ada saat ini berada pada fase tidak terlalu mengikat, dengan pengertian adat biasa dimengerti dengan baik dan dimusyawarahkan. Segala keputusan yang akan diambil terlebih dahulu dimusyawarahkan dan disepakati secara bersama.

C. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Perambahan

Sebagaimana masyarakat desa pada umumnya, masyarakat desa koto perambahan bekerja sebagai petani, pedagang dan lainnya. Disamping bertani, banyak juga diantara mereka yang menggeluti usaha

peternakan, terdapat kandang-kandang hewan didesa Koto Perambahan, terlihat juga kambing, kerbau, sapi dan ayam yang beraktivitas disekitaran desa, dan pengusaha ternak yang membeli hewan ternak di desa Koto Perambahan seperti pada saat hari raya Qurban atau Idul Adha.

Karena Desa Koto Perambahan merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL VI
PENDUDUK DESA KOTO PERAMBAHAN
MENURUT MATA PENCAHARIAN

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Petani	700	61.51%
2.	Peternak	30	2.63%
3.	Pedagang	150	13.18%
4.	PNS/Honorar	120	10.54%
5.	Buruh	55	4.83%
6.	Lain-lain	73	6.41%
	JUMLAH	1.138	100%

Sumber :Kantor Desa Koto Perambahan, 2019.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Koto Perambahan bekerja sebagai Tani pada lahan-lahan yang ada di Desa Koto Perambahan dan di luar wilayah Desa Koto Perambahan dan juga membangun usaha peternakan di sekitar wilayah desa serta pedagang, hal ini dapat dimaklumi karena Desa Koto Perambahan merupakan wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agraris yang wilayahnya dilalui oleh aliran sungai Kampar yang menyebabkan pola kehidupan di daerah ini terfokus kepada kondisi sungai tersebut, baik lapangan pertanian, peternakan, perikanan maupun transportasi. Namun dewasa ini, semenjak dibangunnya bendungan PLTA Koto Panjang, fungsi sungai untuk perikanan dan transportasi mengalami penurunan baik dari segi pemanfaatan maupun dari segi penghasilan.²⁴

Karena itu, sektor pertanian dan peternakan menjadi andalan masyarakat di daerah ini, di samping sektor lainnya. Selain itu, sungai juga dijadikan sebagai tempat usaha penambangan batu pasir yang dilakukan oleh masyarakat yang mendapat saingan dari perusahaan-perusahaan besar yang juga mengelolabatuan pasir.

²⁴*Ibid*, h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

J. Kebijakan Publik

Kebijakan sebagai salah satu instrumen dalam sebuah pemerintahan menjadi sangat penting karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sangsekerta dan latin. Akar kata dalam bahasa yunani dan sangskerta adalah *polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa inggris pertengahan *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.²⁵

Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Fase penyusunan agenda, disini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
2. Fase formulasi kebijakan, disini para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, disini alternatif kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas atau konsensus kelembagaan.
4. Implementasi kebijakan, disini kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya, terutama finansial dan manusia.

²⁵William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003), h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penilaian kebijakan, disini pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditentukan.²⁶

Berikut ini dijelaskan proses analisis kebijakan, yaitu :

1. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan masalah antara lain :
 - a. Pencarian masalah
 - b. Pendefinisian masalah
 - c. Spesifikasi masalah
 - d. Pengenalan masalah
2. Peramalan masa depan kebijakan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual tentang situasi sosial dimasa depan atas dasar informasi yang telah ada tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan, yaitu :
 - a. Akurasi ramalan
 - b. Kondisi komperatif masa depan
 - c. Konteks
3. Rekomendasi kebijakan, yaitu menentukan alternatif yang terbaik. Terdapat enam kriteria untuk rekomendasi kebijakan antara lain :
 - a. Efektifitas
 - b. Efisiensi

²⁶ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kecukupan
 - d. Perataan
 - e. Responsifitas
 - f. Kelayakan
4. Pemantauan hasil kebijakan, yaitu untuk memberi informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Ekspalanasi
 - b. Akutansi
 - c. Pemeriksaan
 - d. Kepatuhan
 5. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan.

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas Negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya Negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya Negara.²⁷

Bentuk kebijakan publik secara sederhana terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum/mendasar, yaitu UUD 1945, UU/Peraturan pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

²⁷Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta : Gramedia, 2003), h. 36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksana. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota. Kebijakan dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
3. Kebijakan publik bersifat mikro ialah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.²⁸

Sedangkan Richard Rose berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan serta ada konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri.²⁹ Melihat dampak yang ditimbulkan dari kebijakan/keputusan yang dibuat dan apa pertanggungjawaban/langkah yang diambil pemerintah terhadap akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, karena keputusan itu tidak berdiri sendiri akan tetapi saling terkait antara kebijakan satu dengan yang lainnya, dengan begitu pemerintah harus mempersiapkan *win solution* sebelum permasalahan lain muncul.

K. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya

²⁸ Ibid, h. 60

²⁹ Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁰ Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³¹

Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.³²

Dari pengertian-pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

³⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 20

³¹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

³² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan kemudian dibuat dalam suatu bentuk undang-undang namun kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

L. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah :

“implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.”³³

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang dikutip oleh Agustino mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, akan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.³⁴

Implementasi kebijakan diatas dapat disimpulkan dalam membuat suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah berbentuk undang-undang, perintah-

³³ Winarno dkk, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002), h. 101

³⁴ Agustino dkk, *Dasar-Dsar Kebijakan Publik*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), h. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perintah dan keputusan yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Kebijakan perda tentang penyelenggaraan dan penertiban pternakan serta kesehatan hewan yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang kemudian lembaga eksekutif membuat suatu peraturan secara jelas dan sasaran kebijakan yang ingin mencapai tujuan yang diinginkan bersama dalam mengimplementasikannya.

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individu project dan yang kedua apakah program tersebut tercapai.³⁵

Menurut Nugroho, terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan.³⁶

Dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, belum tentu bagus kalau dalam implementasi kebijakan tidak berjalan dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan. Dari suatu kebijakan yang sangat menentukan adalah implementasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena implementasi inilah tahunya suatu kebijakan tercapai atau gagalnya kebijakan tersebut.

Jadi, implementasi kebijakan itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapaitujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Berarti pemerintah telah membuat suatu tindakan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan ketertiban dan kenyamanan sosial.

³⁵ Winarno, Op.Cit, h. 102.

³⁶ Nugroho, Op. Cit, h.158



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Teori implementasi menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun, syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksanaan tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai;
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai perhubungannya;
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil;
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.³⁷

Kebijakan dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula

³⁷ Bambang Sunggono, *Kebijakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan.
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi.
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.³⁸

Kinerja instansi banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini, terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Walaupun anggaran rutin dan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin banyak, nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan oleh instansi pemerintah. Sebab keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks perlu adanya pragmentasi organisasi (organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang kompleks.

³⁸ *Ibid*, h. 144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N. Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi Kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pembagian potensi

Sebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.³⁹

Menurut James Anderson, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :

- a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
- d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik.

³⁹ *Ibid*, h. 149-153

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (betentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.⁴⁰

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

O. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik menurut Bambang Sunggono yaitu:⁴¹

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi

⁴⁰ *Ibid*, h. 144-145

⁴¹ *Ibid*, h. 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan/peraturan hukum.

- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.
- d. Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.

P. Pengertian Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrument aturan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).⁴²

Peraturan Daerah adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau untuk mewujudkan kebijaksanaan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam lingkungan pemerintah daerah yang

⁴² [www. Academia.edu/2181213/Makalah_Peraturan_Daerah](http://www.Academia.edu/2181213/Makalah_Peraturan_Daerah), diakses pada tanggal 6 februari 2020, pukul 14.16 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun isi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1, menjelaskan peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan. Sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan ternak ialah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian dan peternak ialah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
2. Pasal 45, pasal ini menjelaskan tentang kewajiban bagi pemilik hewan ternak. Setiap pemilik hewan atau ternak diwajibkan memelihara dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliraran. dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk, wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah atau kepala desa setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pasal 46, menjelaskan tentang larangan bagi pemilik hewan ternak. Peternak dilarang melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan. Dilarang melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian melepas hewan atau ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.
4. Pasal 55 menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah dan kepala desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini.

Q. Pengertian Hewan Ternak

Dijelaskan bahwa hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu :

1. Hidup dibawah pengawasan manusia
2. Berkembangbiak dibawah pengawasan manusia
3. Memberi keuntungan kepada manusia seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja dan sebagainya.⁴³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembangbiaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara

⁴³ Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1987), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

husus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.⁴⁴

Pengertian diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hewan ternak ialah semua hewan yang dipelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk mendapatkan manfaat dari padanya. Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembangbiakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain lain.⁴⁵ Menurut Samad sostroamidjoyo memberikan pengertian beternak dlam dua arti, yaitu :

1. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (*Animal Hosbandri*).
2. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.⁴⁶

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa beternak ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang peternak untuk memelihara hewan dan mengembangbiakkan hewan-hewan tertentu, baik itu usaha yang punya cakupan luas maupun dalam skala yang agak khusus untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dari padanya.

⁴⁴ Undang-Undang No.6 Tahun 1976, Op.Cit

⁴⁵ M. Samad Sostroamidjoyo, dkk, *Peternakan Umum*, (Jakarta, Yagasuma, 1987), h. 5

⁴⁶ *Ibid*, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beternak merupakan salah satu usaha yang disebut usaha tani. Beternak dapat dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Salah satu tujuan dari usaha ternak adalah untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang ataupun berupa hasil seperti susu, daging, telur dan sebagainya.⁴⁷ Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seorang peternak antara lain :

1. Penyediaan makanan yang memadai

Makanan adalah salah satu faktor terpenting dalam usaha ternak, sehingga makanan menjadi cabang ilmu tersendiri dalam ilmu peternakan, makanan mempunyai peranan terpenting dalam kehidupan ternak, baik diperlukan untuk pertumbuhan ternak-ternak muda maupun untuk mempertahankan hidupnya dan menghasilkan suatu produksi dan tenaga bagi ternak-ternak dewasa serta fungsi untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan.

Setiap makanan yang diberi pada seekor ternak harus sempurna dan mencukupi. Sempurna dalam arti bahwa makanan yang diberikan pada ternak tersebut harus mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh ternak sebagai kualitas yang baik, cukup berarti makanan yang diberikan pada ternak itu sesuai banyakya dengan kebutuhan ternak yang bersangkutan.⁴⁸

2. Penyediaan kandang yang baik

Pemilik hewan atau ternak diwajibkan memelihara dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliraran.⁴⁹ Kandang bukan saja sekedar tempat ternak berteduh dari terpaan hujan dan angin atau serangan musuh, kandang menjadi bagian

⁴⁷ *Ibid*, h.7

⁴⁸ *Ibid*, h. 31

⁴⁹ Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016, Op. Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenting dari peternakan, pembuatan kandang yang tidak memenuhi persyaratan justru akan membuat ternak mudah sakit dan merugikan peternak.

Secara umum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang ternak :

- a. Bahan Bangunan, untuk membuat kandang dianjurkan memakai bahan bangunan yang relatif murah dan mudah didapat. bahan tersebut juga tidak mudah rusak.
- b. Ventilasi, ternak membutuhkan udara segar dan sinar matahari, karenanya ventilasi kandang harus mendapat perhatian khusus. Apabila aliran udara tidak lancar, maka udara dalam kandang akan pengap.
- c. Lokasi, banyak sekali pertimbangan dalam menentukan lokasi kandang. Dari segi kesehatan ternak, pilihlah tempat yang agak tinggi dari pada tanah sekitarnya dan jangan memilih lokasi dibawah bukit atau cekungan, karena ditempat yang agak tinggi akan mudah memperoleh udara segar.⁵⁰

Dari segi hidup bermasyarakat, kandang ternak sebaiknya tidak menimbulkan bau busuk. Seperti bunyi pasal 45 ayat (2) perda no 9 tahun 2016 “lokasi kandang atau tempat mengikat hewan atau ternak sebagaimana dimaksud harus jauh dari : pemukiman penduduk, rumah ibadah, tempat pendidikan, sungai-sungai/sumber air bersih, pasar-pasar, terminal, fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah dan tempat-tempat

⁵⁰M. Samad Sostroamidjoyo, Op. Cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keramaian lainnya”.⁵¹ Namun dibalik itu semua, tidak jarang peternak yang lalai atau bahkan sengaja melepaskan hewan atau ternak mereka sehingga berkeliaran kepemukiman masyarakat yang bisa menimbulkan kerusakan bahkan kerugian.

R. Pemeliharaan Hewan Ternak Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di daat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.⁵²

Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir. Sedangkan kawasan pengembalaan umum adalah lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi pengembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.⁵³

Dalam hal tersebut, tidak ada lahan yang disediakan oleh pemerintah maupun lahan yang dihibahkan oleh perseorangan ataupun perusahaan di Desa

⁵¹ Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016, Op. Cit

⁵² Ibid,

⁵³ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Perambahan, sehingga masyarakat menjadi bingung untuk menempatkan ternak pada siang hari jika diantara mereka tidak memiliki lahan pribadi, itulah sebabnya terjadi ada ternak yang diikat disekitaran lapangan bola.

Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.⁵⁴ Sedangkan banyak diantara peternak yang tidak memenuhi pakan sehingga ada diantara ternak-ternak tersebut yang berkeliaran untuk mencari makanan bahkan sampai keperkarangan rumah masyarakat, sehingga menimbulkan kerusakan bahkan kerugian. Peternak harus memenuhi kebutuhan pakan dan bahan pakan yang baik untuk ternaknya, dilakukan melalui pengadaan pakan dan bahan pakan, pembudidayaan tanaman pakan dan pengelolaan pakan meliputi pengawetan, penyimpanan dan pencampuran bahan pakan. Selanjutnya pemerintah daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.

Ketentuan cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.⁵⁵

Dalam wilayah kabupaten kampar, pemilik hewan ternak dilarang :

- a. Melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;

⁵⁴ Ibid,

⁵⁵ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Melepas/mengembalikan hewan atau ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
10. Melepas hewan atau ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.⁵⁶

Pemilik yang hewan atau ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas, wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada dikandang penampungan, jika pemilik hewan ternak menyediakan pakan ternak, maka kepada pemilik hewan ternak akan dikenai biaya pengganti dan besarnya uang pengganti pakan ternak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Kewajiban petugas dalam melakukan penertiban peternakan serta kesehatan hewan yaitu :

- a. Menjaga keselamatan hewan atau ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. Menjaga keamanan hewan atau ternak yang ditangkap;
- c. Menyampaikan/mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap terak tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.⁵⁷

Larangan bagi petugas dalam melakukan penertiban peternakan serta kesehatan hewan adalah :

⁵⁶*Ibid,*

⁵⁷*Ibid,*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan atau ternak.

b. Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan atau ternak yang dilelang.

Biaya tebusan penangkapan :

a. Hewan atau ternak yang ditangkap oleh tim dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan

b. Uang tebusan sebagaimana dimaksud akan disetor ke Kas Daerah.

c. Besarnya uang tebusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan tebusan :

a. Setiap hewan atau ternak yang ditangkap oleh tim penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.

b. Apabila dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan, pemilik hewan atau ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.

c. Mekanisme lelang yang dimaksud mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Ketentuan pelelangan :

a. Hasil pelelangan juga harus diketahui oleh pemilik hewan atau ternak.

b. Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud, akan dikembalikan kepada pemilik setelah melalui perhitungan semua kewajiban dan administrasi pelelangan.

c. Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

⁵⁸ Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan penertiban hewan atau ternak :

- a. Pemerintah berkewajiban menyiapkan kandang untuk mengamankan hewan atau ternak hasil penertiban.
- b. Penertiban hewan atau ternak dilakukan oleh tim penertiban hewan atau ternak Kabupaten Kampar dengan melibatkan instansi vertikal lainnya.
- c. Personil keanggotaan dan tugas tim penertiban, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pembinaan dan pengawasan :

- a. OPD yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Lurah dan Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah ini.
- b. Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.⁵⁹

⁵⁹*Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi pasal 64 ayat (b) pada peraturan daerah No 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan serta Kesehatan Hewan di desa Koto Perambahan adalah :

1. Implementasi perda no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang harus diperbaiki, walaupun sudah terdapat mekanisme yang baik, namun apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kuang berjalannya peraturan tersebut dalam hal ini terdapat sosialisasi yang tidak optimal, pelaksanaan yang tidak berkelanjutan disamping adanya kurang kepedulian masyarakat dan juga peternak yang tidak melaksanakan aturan dari perda ini terkhusus yang terdapat dalam pasal 46 ayat (b).
2. Adapun indikator yang menyebabkan tidak terlaksananya pasal 46 ayat (b) dalam implementasi perda No 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan penertiban peternakan serta kesehatan hewan adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komunikasi, belum maksimalnya komunikasi dalam sosialisasi yang dilakukan sehingga baik aparat pelaksana, peternak maupun masyarakat yang belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing.
- b. Sumber daya, berdasarkan pengamatan penulis bahwa sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal dari segi pelaksanaannya.
- c. Disposisi, hal ini berkaitan dengan sikap dan konsistensi implementor yang terkesan mengabaikan perda tersebut. Sehingga pelaksanaan upaya penegakan perda belum maksimal dan berkelanjutan.
- d. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam mengimplementasikan perda serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam perda tersebut, namun implementor belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
- e. Anggaran yang belum di tunjang sesuai dengan kebutuhan perda.

D. Saran

Adapun saran yang dapat diambil untuk menjadi catatan bagi pihak terkait diataranya :

- a. Pemerintah kabupaten kampar melalui instansi yang terkait dengan perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi perda no 9 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan

penertiban peternakan serta kesehatan hewan tersebut agar menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang melanggar perda tersebut.

- b. Diharapkan kepada penilik hewan ternak agar lebih memelihara ternaknya agar tidak mengganggu ketentraman umum dan menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angket ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban masyarakat yang memiliki hewan ternak.

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda ceklist pada kolom TAHU/SETUJU/PERNAH jika deskripsi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang anda rasakan. Jika tidak, berikan ceklist pada kolom TIDAK TAHU/TIDAK SETUJU/TIDAK PERNAH

NO	DESKRIPSI	TANGGAPAN					
		T	TH	S	TS	P	TP
1.	Saya mengetahui ada peraturan daerah tentang hewan ternak.						
2.	Saya pernah mengikuti sosialisasi peraturan daerah tentang hewan ternak.						
3.	Saya mengetahui bahwa hewan ternak saya berkeliaran di pekarangan rumah masyarakat dan menimbulkan kerugian.						
4.	Hewan ternak saya pernah terjaring razia.						
5.	Sarana dan prasarana yang menunjukkan bahwa peraturan ini ada tidak memadai, seperti petunjuk spanduk pamflet dan lain-lain.						
6.	Saya mengetahui aturan yang melarang melepas/mengembalikan hewan ternak di pekarangan rumah.						

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Saya mengetahui apa saja sanksi bagi peternak yang ternaknya berkeliaran di perkarangan rumah.						
8.	Saya pernah mendapat sanksi jika ternak saya menimbulkan kerugian dalam masyarakat.						
9.	Sanksi yang ada pada peraturan daerah harus diterapkan.						

Ket :

T = TAHU

TT = TIDAK TAHU

S = SETUJU

TS = TIDAK SETUJU

P = PERNAH

TP = TIDAK PERNAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Angket penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keresahan masyarakat terhadap hewan ternak yang berkeliaran di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa. Kami mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda ceklist pada kolom **TAHU/SETUJU/TERGANGGU** jika deskripsi yang diberikan sesuai dengan kondisi yang anda rasakan. Jika tidak, berikan ceklist pada kolom **TIDAK TAHU/TIDAK SETUJU/TIDAK TERGANGGU**

NO	DESKRIPSI	TANGGAPAN				
		T TTG	TH	S	TS	TG
1.	Saya mengetahui didesain ada usaha peternakan, seperti kambing, sapi, kerbau.					
2.	Ada hewan ternak berkeliaran di pekarangan rumah, tempat olahraga yang bisa menimbulkan kerusakan.					
3.	Saya merasa terganggu jika ternak-ternak tersebut masuk kepekarangan rumah saya.					
4.	Saya mengetahui pernah ada sosialisasi tentang peraturan daerah nomor 9 tahun 2016					
5.	Sosialisasi tentang peraturan daerah ini harus diperbanyak agar					

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

	diketahui orang banyak.						
6.	Saya mengetahui aturan yang melarang melepas/mengembalikan hewan ternak di perkarangan rumah.						
7.	Saya mengetahui siapa saja sanksi bagi peternak yang ternaknya berkeliaran di perkarangan rumah.						
8.	Peternak harus mengganti kerugian atas kerusakan yang ditimbulkan hewan ternaknya.						
9.	Sanksi yang ada pada peraturan daerah harus diterapkan.						
10.	Ketidak tegasan pemerintah dalam menerapkan sanksi, sehingga peternak tidak takut jika hewan/ ternaknya berkeliaran.						

Ket :

T = TAHU

TT = TIDAK TAHU

S = SETUJU

TS = TIDAK SETUJU

TG = TERGANGGU

TTG = TIDAK TERGANGGU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino dkk, *Dasar-Dsar Kebijakan Publik*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008),
- Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, (Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1987),
- Bambang Sunggono, *Kebijakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999),
- Bambang Sunggono, *Metotodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011),
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),
- Jonaedi Efendi dkk, *Metode peneitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2018) cetakan 2,
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 150),
- M. Samad Sosroamidjoyo, dkk, *Peternakan umum*, (Jakarta : Yagasuna, 1978),
- Riant Nugroho, *Publik Policy : Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, (Jakarta : Elekmedia Komputindo, 2011),
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES),
- Nugroho, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta : Gramedia, 2003),
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002),
- R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 2*, (Yogyakarta : Kenisius),
- R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 3*, (Yogyakarta : Kenisius),
- Samodra Wibawa, *Politik Perumusan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001),

Sumarsono dkk, *Sistem Pemerintahan Tradisional Di Riau*, (Jakarta : Cv. Putra Sejati Raya),

Undang-Undang No. 6 Tahun 1976 Tentang Ternak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan

Profil Desa Koto Perambahan, Tahun 2018,

Wiliam N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2003),

Winarno dkk, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2002),

www.Academia.edu/2181213/Makalah_Peraturan_Daerah, diakses pada tanggal 6 februari 2020, pukul 14.16 WIB

www.bps.go.id, Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar. Diakses pada 4 februari 2020. Pukul 22.10 WIB

www.google.com/amp/s/m.tribunnews.com/amp/regional/2017/03/16/aziz-zainal-catur-sugeng-bupati-dan-wakil-bupati-kampar-2017-2022, diakses pada 04 februari 2020, pukul 22.08 WIB.

https://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada tanggal 24 oktober 2019, pukul 19.00 WIB

<https://www.riaumagz.com/2018/07/profil-kabupaten-kampar-riau.html?m=1>, diakses pada tanggal 4 februari 2020, pukul 22.00 WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3126/2020

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Lilis Rahmawati
Nim	: 11627204087
Tempat,gl.Lahir	: kp.panjang / 15 April 1998
Semester	: VIII (Delapan)
Prodi	: Ilmu Hukum S1
Konsentrasi	: Tidak Ada
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Penertiban Peternakan Serta Kesehatan Hewan di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampa

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 27 April 2020 dengan IPK 3.53 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 04 Mei 2020

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengekelo Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: LILIS RAHMAWATI

: 11627204087

: ILMU HUKUM

: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI
DESA KOTO PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA

Pembimbing : Ilham Akbar, SH. MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Mei 2020

Ana Pimpinan Redaksi



M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/29272
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 0001/F.I/PP.00.9/9303/2019 Tanggal 20 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : LILIS RAHMAWATI
2. NIM / KTP : 11627204087
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KAMPAR
6. Judul Penelitian : IMPLEMENSTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TANTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERBITAN PERTERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA KOTA PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian : DINAS PERTERNAKAN KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

BANGKINANGKOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/1149

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN RISET/29272 tanggal 30 Desember 2019, dengan ini memberi Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

: **LILIS RAHMAWATI**
 : 11627204087
 : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 : ILMU HUKUM
 : S1
 : PEKANBARU
 : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
 PENERBITAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI
 DESA KOTA PERAMBAHAN KECAMATAN KAMPA**
 : DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan dan tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.

2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 31 Desember 2019

KERALA KANTOR KESBANGPOL
 Kepala Kesatuan Bangsa

QNNITA, SE
 NIP. 19701208 199201 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kampar.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1804 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENERTIBAN PETERNAKAN SERTA KESEHATAN HEWAN DI DESA KOTO PERAMBANGAN KECAMATAN KAMPA", ditulis oleh saudara :

Nama : LILIS RAHMAWATI

NIM : 11627204087

Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 07 November 2019

Narasumber : Syafrinaldi, SH,MA

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 15 November 2019

Narasumber

Erni S.Sos., MM
NIP. 9680226 199103 2 002

Syafrinaldi, SH,MA
NIP. 19810923 200604 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : U.04/F.I/PP.00.9/10386/2019

Pekanbaru, 30 Desember 2019

Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: FITRI AYU LESTARI
NIM	: 11627204286
Jurusan	: Ilmu Hukum SI
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Pulau Rambai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PELAKSANAAN RANCANGAN PERATURAN DESA DAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 DI DESA PULAU RAMBAI KECAMATAN KAMPA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

LILIS RAHMAWATI